

STATISTIK

KEUANGAN DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

STATISTIK

KEUANGAN DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

2020



STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 2020

ISSN : 0126 – 4698
No. Publikasi : 18540.2109
Katalog BPS : 7201001.18
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 83 halaman

Naskah:
BPS Provinsi Lampung

Penyunting:
BPS Provinsi Lampung

Desain Kover oleh:
BPS Provinsi Lampung

Penerbit
©BPS Provinsi Lampung

Pencetak:
CV. JAYA WIJAYA

Sumber Ilustrasi: freepik.com

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung**

KATA PENGANTAR

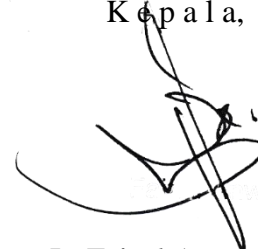
Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2020, merupakan seri publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019 dan tahun 2020 pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.

Sumber data statistik keuangan ini diperoleh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil survei keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, November 2021

BPS PROVINSI LAMPUNG

K e p a l a,



Ir. Faizal Anwar, MT.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENJELASAN UMUM.....	1
1.1. Pendahuluan.....	1
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data.....	2
BAB II. KONSEP DAN DEFINISI.....	5
BAB III. ULASAN RINGKAS.....	13
3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung.....	14
3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung.....	16
3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung.....	17
3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.....	20
3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	21
3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	22

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2019 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2020 (Juta Rupiah).....	15
Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2020 (Juta Rupiah).....	16
Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2019 – 2020.....	19
Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2019 - 2020 (Ribu Rupiah).....	21
Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2019 - 2020.....	23
LAMPIRAN TABEL.....	13
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2019 - 2020.....	27
Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2019 - 2020.....	28
Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2019 - 2020.....	29
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2019 - 2020	30
Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2019 - 2020	31
Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 2019 - 2020	32
Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 2019 - 2020.	33
Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2019 - 2020	34

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2019 – 2020	35
Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2019 - 2020....	36
Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 2019 - 2020	37
Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2019 - 2020.....	38
Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2020.....	39
Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2019 - 2020.....	40
Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019 - 2020	41
Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2019 - 2020...	42
Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2019 - 2020.....	43
Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2019 - 2020.....	44
Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2019 – 2020	45
Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2019 - 2020	46
Tabel 21. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2019 - 2020.....	47
Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2019 - 2020 ...	48
Tabel 23. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2019 - 2020.....	49
Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2019 - 2020...	50
Tabel 25. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2019 - 2020.....	51
Tabel 26. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2019 - 2020	52
Tabel 27. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2019 - 2020.....	53

Tabel 28. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2019 - 2020	54
Tabel 29. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2020	55
Tabel 30. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2019 - 2020	56
Tabel 31. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019 - 2020	57
Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2019 - 2020.....	58
Tabel 33. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2019 - 2020.....	59
Tabel 34. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2019 – 2020	60
Tabel 35. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2019 - 2020	61
Tabel 36. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2019 – 2020	62
Tabel 37. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2019 - 2020	63
Tabel 38. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 2019 - 2020	64
Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 2019 - 2020	65
Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 2019 - 2020	66
Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 2019 – 2020	67
Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2019 - 2020.....	68
Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang 2019 - 2020.....	69
Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2019 - 2020.....	70

Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2020.....	71
Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2019 - 2020.....	72
Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2019 - 2020	73
Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2019 - 2020..	74
Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2019 - 2020....	75
Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2019 - 2020.....	76
Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2019 - 2020.....	77

<https://lampung.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 2020	17
Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2020	18
Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2020	22

BAB I. PENJELASAN UMUM

1.1. Pendahuluan

Arah kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2020, maka pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah tersebut dalam mengalokasikan APBD didasarkan pada program-program pembangunan yang disusun dengan perspektif kedepan sesuai dengan prosedur dan mekanisme mulai dari perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola APBD yang merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga merupakan cermin finansial ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat. Selain itu anggaran belanja lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk percepatan implementasi program-program unggulan daerah. Dalam pengelolaannya berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis serta memperhatikan kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Publikasi statistik keuangan daerah Provinsi Lampung secara umum menyajikan data tentang pendapatan dan belanja pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama dua periode tahun anggaran.

Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari statistik keuangan daerah Provinsi Lampung ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- c. Memberikan informasi bagi pemerintah pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.
- d. Sebagai salah satu indikator bagi swasta ataupun masyarakat untuk menanamkan investasi sesuai dengan potensi yang ada di daerah yang bersangkutan.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data statistik keuangan daerah Provinsi Lampung diperoleh dari pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung secara sensus dengan menggunakan kuesioner survei keuangan pemerintah provinsi (Realisasi APBD 2020) atau K-1 dan kuesioner survei keuangan pemerintah kabupaten/kota (Realisasi APBD 2020) atau K-2.

1.2.1. Statistik keuangan daerah tingkat provinsi

Pencacahan statistik keuangan daerah Provinsi Lampung dilakukan setiap tahun dengan menggunakan kuesioner K-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- 1.2.2. Pencacahan keuangan daerah kabupaten/kota dilakukan secara lengkap di seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan kuesioner K-2. Sumber data diperoleh dari bagian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di masing-masing kabupaten/kota.

1.2.3. Jenis kuesioner yang digunakan

Kuesioner K-1

Kuesioner ini digunakan untuk mencatat data statistik yang menyangkut realisasi keuangan daerah provinsi.

Kuesioner K-2

Kuesioner K-2 adalah jenis daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang realisasi keuangan daerah kabupaten/kota.

<https://lampung.bps.go.id>

BAB II. KONSEP DAN DEFINISI

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota adalah realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah sendiri. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- Pajak daerah, adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Penerimaan pajak daerah antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.
- Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas.

Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, penjualan produksi daerah, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

- Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, adalah penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- Lain-lain PAD yang sah, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang tertentu yang meliputi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dan pendapatan denda pajak.

Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Bagi Hasil Pajak:
Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

- Bagi Hasil Bukan Pajak :

Bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPP), pemberian hak atas tanah negara, iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, bagi hasil dari cukai tembakau, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

- DAU

DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- DAK

DAK adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah digariskan.

- Lain-lain pendapatan yang sah, adalah penerimaan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi/penyeimbangan/penyesuaian dari pemerintah, dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis *solvability*.

Kebijakan umum belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada kegiatan sektoral yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai Permendagri tersebut telah ditentukan bahwa struktur belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

- Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam belanja pegawai termasuk juga uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta

gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
- Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar, dapat dilaksanakan dengan menetapkan belanja *multi years* dan/atau *turn key* yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD.

- Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari duabelas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari duabelas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dengan maksud menutup defisit atas memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

BAB III. ULASAN RINGKAS

Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi sentral dalam pembangunan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan, ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Selain itu, APBD juga merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipakai juga sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan, dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian APBD harus dirancang untuk mengarahkan alokasi dana yang membiayai berbagai program dan kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan kepuasan publik (*public satisfaction*) sebagai wujud pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga pembangunan daerah yang efektif dan efisien dapat dicapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut, maka format APBD juga mengalami perubahan terutama di sisi belanja daerah.

3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran langkah konkret untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera, dengan prioritas pada pembangunan bidang infrastruktur, pertanian, industri dan pariwisata, pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi. Hal tersebut menjadi upaya prioritas untuk percepatan pertumbuhan Provinsi Lampung dan mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga pembangunan berjalan sinergi dan penuh koordinasi.

Untuk itu otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, pemerintah daerah memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan PAD. Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontingensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Dalam merumuskan target anggaran pendapatan pemerintah Provinsi Lampung, cenderung menentukan target minimal dari sumber PAD. Dengan adanya kenaikan penerimaan dana perimbangan, maka pendapatan daerah pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020 yang ditargetkan sebesar 7,19 trilyun rupiah, lebih rendah dari penerimaan yang diperoleh pada tahun 2019 yaitu 7,48 trilyun rupiah atau turun 3,82 persen. Karena masih berupa rancangan, maka belum tentu sama dengan realisasinya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. (Tabel 3.1).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2020 dianggarkan mencapai 4,19 trilyun rupiah mengalami kenaikan 59,54 persen dari tahun 2019 yaitu sebesar 2,63 trilyun rupiah. Dana perimbangan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. (Tabel 3.1).

Berdasarkan struktur belanja pemerintah daerah, belanja tidak langsung dianggarkan mencapai 5,16 trilyun rupiah mengalami kenaikan 12,25 persen dari tahun 2019 yaitu sebesar 4,60 trilyun rupiah. Sementara itu, belanja langsung tahun 2020 dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar 1,86 trilyun rupiah turun 24,31 persen dari realisasi tahun 2019 sebesar 2,46 trilyun rupiah. (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2019 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2020 (Juta Rupiah)

Rincian	Realisasi 2019	Anggaran 2020	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	7 480 984,44	7 195 028,27	(3,82)
Pendapatan Daerah	7 266 993,44	6 941 828,27	(4,47)
Pendapatan Asli Daerah	3 018 067,29	2 699 882,48	(10,54)
Dana Perimbangan	2 627 195,35	4 191 460,29	59,54
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1 621 730,80	50 485,50	(96,89)
Penerimaan Pembiayaan	213 991,00	253 200,00	18,32
PENGELUARAN DAERAH	7 144 852,06	7 195 028,27	0,70
Belanja Tidak Langsung	4 601 397,97	5 164 996,30	12,25
Belanja Langsung	2 457 315,92	1 859 851,97	(24,31)
Pengeluaran Pembiayaan	86 138,17	170 180,00	97,57

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Perubahan dalam perencanaan anggaran suatu pemerintahan tidak selalu berdampak negatif. Hal tersebut dapat menyesuaikan situasi perekonomian, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, optimalisasi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber penerimaan dapat mencapai target penerimaan yang telah dianggarkan. Hal ini juga terlihat pada rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2020. Dari rencana penerimaan sebesar 7,19 trilyun rupiah dalam realisasinya diperoleh 7,35 trilyun rupiah atau mengalami kenaikan 2,23 persen. (Tabel 3.2).

Dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran daerah berbeda dengan penerimaan. Realisasi anggaran lebih rendah dari yang dianggarkan tahun 2020. Hal tersebut terlihat pada perubahan beberapa komponen pendukungnya seperti belanja tidak langsung dan pembiayaan yang mengalami penurunan. Realisasi belanja tidak langsung turun 58,48 persen menjadi 2,14 triliun rupiah dari 5,16 triliun rupiah yang dianggarkan. (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2020 (Juta Rupiah)

Rincian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	7 195 028,27	7 355 624,40	2,23
Pendapatan Daerah	6 941 828,27	7 019 492,01	1,12
Pendapatan Asli Daerah	2 699 882,48	2 841 617,01	5,25
Dana Perimbangan	4 191 460,29	2 461 886,21	(41,26)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	50 485,50	1 715 988,79	3 298,97
Penerimaan Pembiayaan	253 200,00	336 132,39	32,75
PENGELUARAN DAERAH	7 195 028,27	4 456 117,31	(38,07)
Belanja Tidak Langsung	5 164 996,30	2 144 560,81	(58,48)
Belanja Langsung	1 859 851,97	2 309 626,50	24,18
Pengeluaran Pembiayaan	170 180,00	1 930,00	(98,87)

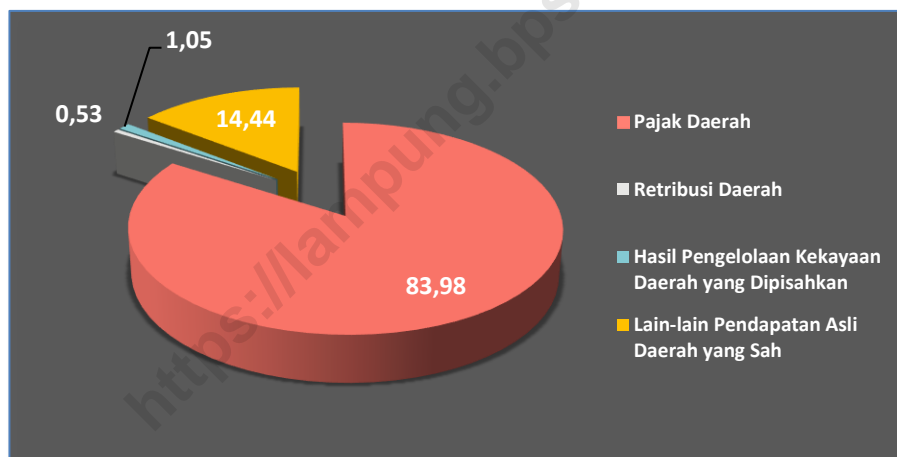
Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Realisasi penerimaan PAD Provinsi Lampung tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,85 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu dari 3,02 triliun menjadi 2,84 triliun rupiah. (Diolah dari Tabel 3.1 Kolom 2 dan Tabel 3.2 Kolom 3).

Untuk mengukur dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan wilayahnya dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan yang dapat didefinisikan dengan rasio. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain. Ditinjau dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, Provinsi Lampung pada tahun 2020 dengan rasio sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan sebesar 40,48 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 41,53 persen. (Diolah dari Tabel 3.2 Kolom 3).

Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, 2020



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Dari Gambar 3.1 tampak bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi Lampung dari penerimaan pajak daerah tahun 2020 merupakan sumber yang paling dominan yaitu 83,98 persen. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat, hanya memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar 0,53 persen. Rendahnya sumbangan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan daerah bisa terjadi karena pada saat perencanaan pemerintah kurang memiliki informasi sektor mana yang diperkirakan masyarakat akan banyak menggunakan fasilitas/pelayanan pemerintah.

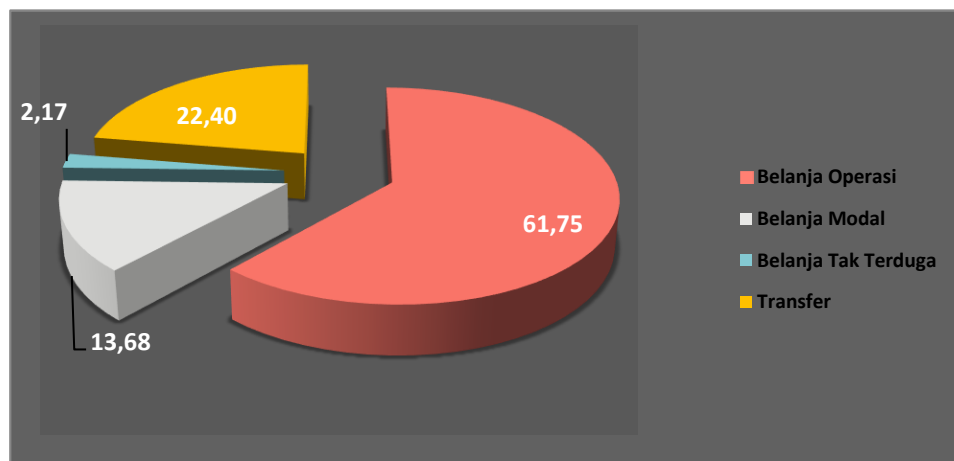
3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. Dilihat dari proporsinya terhadap realisasi belanja daerah tahun 2020, belanja operasi mendominasi pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung sebesar 61,75 persen. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor komponen pendukung belanja operasi yang meliputi belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 11,45 persen dan 44,65 persen. (Gambar 3.2 dan diolah dari Tabel 2).

Seperti halnya pemanfaatan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan baik itu rutin maupun fisik. Hal ini terlihat dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total belanja keseluruhan. Rasio belanja operasi pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 61,75 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. (Gambar 3.2).

Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung 2020



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Dalam mengukur pembangunan infrastruktur, pemerintah Provinsi Lampung masih perlu melakukan perbaikan dan menjadi perhatian. Terlihat dari rasio modal

terhadap total belanja yaitu sebesar 13,68 persen. Hal tersebut menunjukkan persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik infrastruktur masih perlu ditingkatkan. (Gambar 3.2).

Dilihat dari kontribusinya, belanja langsung tahun 2020 mengalami peningkatan. Jika tahun 2019 kontribusinya dalam belanja daerah yaitu 34,81 persen, maka tahun 2020 kontribusi belanja langsung yaitu 35,24 persen. Dengan naiknya *share* belanja langsung tahun 2020, hal ini berarti pemerintah masih cenderung meningkatkan alokasi dananya untuk belanja yang terkait erat dengan dana belanja barang dan jasa serta alokasi belanja pegawai. (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2019 – 2020

Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	100,00	100,00
Belanja Tidak Langsung	65,19	64,76
Belanja Pegawai	24,96	25,25
Belanja Bunga	0,47	0,46
Belanja Subsidi	0,01	0,00
Belanja Hibah	18,83	19,35
Belanja Bantuan Sosial	0,01	0,01
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20,67	17,96
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,23	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	1,74
Belanja Langsung	34,81	35,24
Belanja Pegawai	2,35	3,50
Belanja Barang dan Jasa	18,09	20,76
Belanja Modal	14,37	10,97

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Pembentukan daerah otonomi baru/pemekaran daerah kabupaten/kota sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pemekaran daerah pemerintah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin memahami kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2020, penerimaan daerah se-Provinsi Lampung mengalami penurunan. Dibandingkan tahun 2019, penerimaan daerah tahun 2020 turun 5,93 persen dari 23,56 trilyun rupiah menjadi 22,16 trilyun rupiah. Penurunan tertinggi diperoleh dari sumber dana pendapatan daerah yang sah lainnya sebesar 7,94 persen dari 5,14 trilyun rupiah menjadi 4,73 trilyun rupiah di tahun 2020. (Tabel 3.4).

Tidak berbeda dengan penerimaan daerah, pengeluaran daerah tahun 2020 mengalami penurunan 2,38 persen atau turun menjadi 21,88 trilyun rupiah dari 22,42 trilyun rupiah di tahun 2019. Apabila dilihat dari strukturnya, pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan hingga mencapai 63,73 persen. Adapun belanja langsung yang terkait dengan program tahun 2020 juga turun 8,44 persen. (Tabel 3.4).

Optimalisasi penggunaan anggaran belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung terhadap realisasi belanja tahun 2020 dapat dilihat dari rasio belanja operasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebesar 86,13 persen menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Utara sebesar 93,99 persen, diikuti Kabupaten Lampung Tengah sebesar 89,45 persen, dan Kabupaten Tulang Bawang sebesar 88,89 persen. Sementara itu rasio belanja operasi terendah yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 70,68 persen. (Diolah dari Tabel 35).

Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2019 - 2020 (Ribuan Rupiah)

Rincian	2019	2020	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	23 560 725 703,62	22 163 373 331,37	(5,93)
Pendapatan Daerah	22 542 810 802,08	20 960 763 048,17	(7,02)
Pendapatan Asli Daerah	2 061 454 861,23	2 046 785 209,65	(0,71)
Dana Perimbangan	15 344 949 788,71	14 185 654 988,95	(7,55)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5 136 406 152,14	4 728 322 849,57	(7,94)
Penerimaan Pembiayaan	1 017 914 901,54	1 202 610 283,20	18,14
PENGELUARAN DAERAH	22 416 144 066,69	21 882 520 607,26	(2,38)
Belanja Tidak Langsung	12 264 786 553,46	12 751 846 388,69	3,97
Belanja Langsung	9 854 634 268,79	9 023 063 343,67	(8,44)
Pengeluaran Pembiayaan	296 723 244,43	107 610 874,90	(63,73)

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

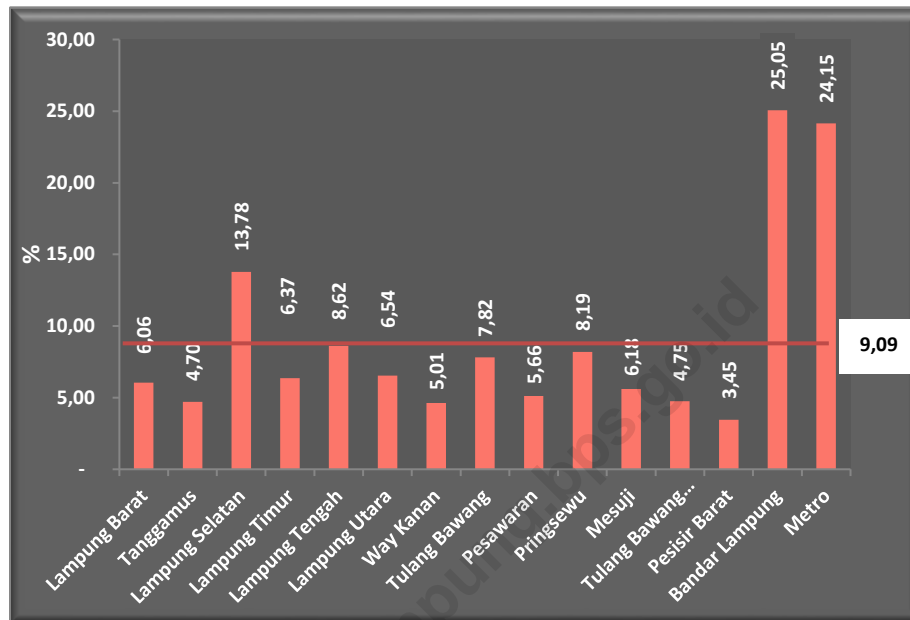
3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Penerimaan pada pos PAD turun 0,71 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 2,06 triliun rupiah menjadi 2,05 triliun rupiah. Akan tetapi dengan rasio PAD terhadap total pendapatan yang hanya mencapai 9,76 persen menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota masih rendah dan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. (Diolah dari Tabel 19).

Dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki rasio kemandirian tertinggi yaitu 25,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya kemandirian Kota Bandar Lampung disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Sementara itu, Kabupaten Pesisir Barat memiliki rasio kemandirian paling rendah yaitu 3,45 persen. (Gambar 3.3).

Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2020



Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

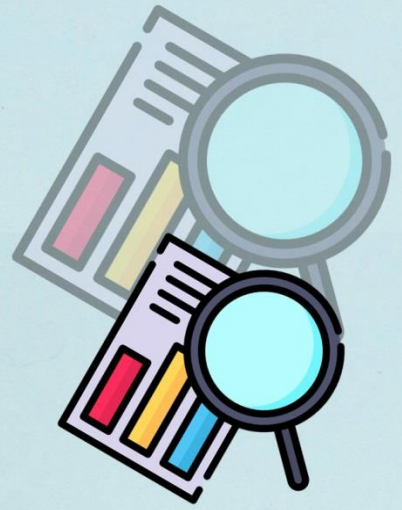
3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2020 meningkatkan kontribusi belanja tidak langsung dari 55,45 persen tahun 2019 menjadi 58,56 persen. Sementara itu, untuk belanja langsung, pemerintah kabupaten/kota justru mengurangi kontribusinya dari 44,55 persen tahun 2019 menjadi 41,44 persen tahun 2020. Dari Tabel 3.5, pemerintah kabupaten/kota meningkatkan rasio belanja pegawai terhadap total belanja menjadi 8,42 persen dari 5,46 persen tahun 2019. Hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota masih mengalokasikan dananya untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur negara.

Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2019 - 2020

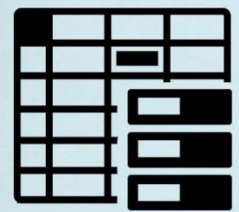
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	100	100
Belanja Tidak Langsung	55,45	58,56
Belanja Pegawai	37,19	37,28
Belanja Bunga	0,00	0,04
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	1,77	3,26
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,30
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,17	0,20
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15,79	16,32
Belanja Tidak Terduga	0,00	1,17
Belanja Langsung	44,55	41,44
Belanja Pegawai	5,46	8,42
Belanja Barang dan Jasa	22,94	20,56
Belanja Modal	15,89	12,46

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



LAMPIRAN

TABEL



Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	7 266 993 438,83	7 019 492 008,74
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3 018 067 291,16	2 841 617 005,68
Pajak Daerah	2 627 888 230,39	2 386 345 268,30
Retribusi Daerah	11 069 477,87	15 176 408,10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27 837 905,35	29 873 630,62
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	351 271 677,55	410 221 698,65
DANA PERIMBANGAN	2 627 195 349,11	2 461 886 209,96
Bagi Hasil Pajak	87 416 096,82	123 204 760,04
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	51 128 238,60	34 589 203,09
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 906 780 297,00	1 732 551 921,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	581 870 716,69	571 540 325,83
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1 621 730 798,56	1 715 988 793,10
Pendapatan Hibah	11 362 590,00	8 835 549,70
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26 756 363,00	46 434 098,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17 746 958,78	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain	1 565 864 886,78	1 660 719 145,40

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	7 058 713 889,02	6 856 416 897,46
Belanja Tidak Langsung	4 601 397 972,21	4 440 290 973,97
Belanja Pegawai	1 761 589 035,08	1 731 078 969,14
Belanja Bunga	33 382 304,47	31 583 615,81
Belanja Subsidi	926 015,48	0,00
Belanja Hibah	1 329 394 600,51	1 326 470 030,80
Belanja Bantuan Sosial	1 030 000,00	352 400,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 459 179 743,87	1 231 408 694,14
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15 896 272,80	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	119 397 264,07
Belanja Langsung	2 457 315 916,82	2 416 125 923,49
Belanja Pegawai	166 083 743,33	240 233 396,09
Belanja Barang dan Jasa	1 277 194 649,47	1 423 469 437,98
Belanja Modal	1 014 037 524,02	752 423 089,42

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	127 852 838,34	138 956 055,44
Penerimaan Pembiayaan Daerah	213 991 004,69	336 132 388,14
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	93 875 534,19	336 132 388,14
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	120 115 470,50	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	86 138 166,35	197 176 332,70
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15 550 000,00	56 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	70 588 166,35	141 176 332,70
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	336 132 388,15	302 031 166,71

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 122 307 632,19	1 011 011 754,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH	65 267 416,66	61 219 465,45
Pajak Daerah	13 376 645,93	11 794 800,88
Retribusi Daerah	2 227 953,29	3 018 063,77
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 431 364,50	4 809 979,70
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45 231 452,95	41 596 621,10
DANA PERIMBANGAN	791 712 917,26	707 243 876,70
Bagi Hasil Pajak	10 686 260,14	10 219 127,88
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 519 994,73	7 911 070,03
Dana Alokasi Umum (DAU)	543 777 950,00	497 587 974,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	231 728 712,39	191 525 704,79
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	265 327 298,26	242 548 412,60
Pendapatan Hibah	67 463 454,00	54 391 888,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	70 674 988,29	62 140 456,60
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	126 016 068,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	127 188 855,98	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 711 964 522,62	1 634 262 482,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH	76 050 778,58	76 828 494,69
Pajak Daerah	20 571 076,17	22 111 991,79
Retribusi Daerah	1 536 190,32	2 157 871,70
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 283 144,63	4 454 087,95
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49 660 367,46	48 104 543,26
DANA PERIMBANGAN	1 131 249 311,79	1 080 168 166,69
Bagi Hasil Pajak	21 674 376,40	21 778 808,19
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	28 116 118,70	28 813 474,27
Dana Alokasi Umum (DAU)	802 326 253,00	718 696 624,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	279 132 563,69	310 879 260,24
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	504 664 432,25	477 265 820,92
Pendapatan Hibah	94 499 444,11	77 010 275,59
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	96 009 633,89	79 130 592,20
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	314 155 354,25	321 124 953,13

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 279 592 336,84	2 103 788 327,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	275 464 317,22	289 838 306,00
Pajak Daerah	117 851 364,60	140 287 776,00
Retribusi Daerah	10 242 771,76	24 741 974,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 927 461,63	8 600 000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138 442 719,24	116 208 556,00
DANA PERIMBANGAN	1 412 941 259,23	1 314 761 598,00
Bagi Hasil Pajak	21 196 370,47	20 508 516,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 181 821,09	4 166 081,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 054 042 773,00	979 091 229,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	331 520 294,67	310 995 772,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	591 186 760,39	499 188 423,00
Pendapatan Hibah	158 812 908,64	109 243 300,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	133 708 036,75	111 793 711,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	295 865 815,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 800 000,00	0,00
Dana Desa	0,00	262 758 029,00
Lainnya	0,00	15 393 383,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 132 688 979,13	2 011 080 268,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	147 527 535,83	128 019 040,30
Pajak Daerah	62 332 058,17	60 205 717,89
Retribusi Daerah	3 925 575,23	3 318 908,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 176 760,33	3 460 827,02
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78 093 142,10	61 033 587,31
DANA PERIMBANGAN	1 475 128 391,94	1 371 023 450,85
Bagi Hasil Pajak	17 012 037,83	28 380 820,81
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	26 029 815,37	16 687 322,62
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 106 577 701,00	1 007 072 973,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	325 508 837,75	318 882 334,42
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	510 033 051,36	512 037 776,85
Pendapatan Hibah	117 993 106,00	109 566 190,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	118 332 439,36	113 410 191,25
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	273 707 506,00	289 061 395,60
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2020

**Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 588 849 568,44	2 086 453 717,58
PENDAPATAN ASLI DAERAH	193 634 175,31	179 883 067,93
Pajak Daerah	92 615 976,25	85 423 990,50
Retribusi Daerah	10 498 043,91	9 646 781,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 523 066,08	7 231 134,96
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83 997 089,07	77 581 161,40
DANA PERIMBANGAN	1 797 258 034,50	1 625 918 929,77
Bagi Hasil Pajak	34 284 076,26	26 055 944,72
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 340 185,42	7 489 539,39
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 378 175 214,00	1 248 686 762,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	379 458 558,82	343 686 683,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	597 957 358,63	280 651 719,88
Pendapatan Hibah	143 726 782,70	164 969 440,98
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	145 048 226,26	115 682 278,91
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	309 099 744,99	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	310 176 977,00
Lainnya	82 604,68	76 467,24

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2019 - 2020

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 775 731 796,77	1 662 256 224,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	101 829 440,15	108 672 849,29
Pajak Daerah	25 519 982,72	25 268 406,16
Retribusi Daerah	2 232 602,63	1 889 950,47
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 743 429,75	9 378 587,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65 333 425,05	72 135 904,68
DANA PERIMBANGAN	1 244 666 930,85	1 122 166 136,76
Bagi Hasil Pajak	13 101 497,62	16 752 561,15
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 257 973,42	7 488 826,21
Dana Alokasi Umum (DAU)	981 730 753,00	880 015 613,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	244 576 706,81	217 909 136,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	429 235 425,78	431 417 238,22
Pendapatan Hibah	81 212 520,00	82 670 861,32
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	98 943 320,98	92 439 261,62
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	248 160 049,00	256 307 115,29
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	919 535,80	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2019 - 2020

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 398 937 421,00	1 289 460 561,99
PENDAPATAN ASLI DAERAH	62 353 561,00	64 617 681,62
Pajak Daerah	19 861 797,00	16 543 967,96
Retribusi Daerah	1 830 633,00	1 434 965,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 626 354,00	4 204 876,08
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36 034 777,00	42 433 872,03
DANA PERIMBANGAN	990 355 064,00	883 983 659,21
Bagi Hasil Pajak	14 149 846,00	11 609 352,60
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 074 100,00	7 727 450,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	681 902 953,00	621 970 133,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	288 228 165,00	242 676 723,61
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	346 228 796,00	340 859 221,16
Pendapatan Hibah	61 427 280,00	70 562 145,50
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	88 025 606,00	77 377 656,93
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196 749 376,00	192 902 501,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	26 534,00	16 917,73

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
2019 - 2020**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 188 271 650,00	1 148 268 456,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH	82 379 613,00	89 767 355,40
Pajak Daerah	25 900 833,00	24 330 461,76
Retribusi Daerah	1 244 629,00	1 447 690,35
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 089 662,00	3 338 821,55
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52 144 489,00	60 650 381,74
DANA PERIMBANGAN	823 127 374,00	782 510 620,43
Bagi Hasil Pajak	17 904 922,00	15 927 661,02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 709 085,00	7 566 205,65
Dana Alokasi Umum (DAU)	639 431 562,00	577 189 919,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	160 081 805,00	181 826 834,77
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	282 764 663,00	275 990 480,33
Pendapatan Hibah	49 725 305,00	55 723 486,80
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	92 247 064,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	68 893 100,53
Dana Desa	131 102 381,00	133 276 906,00
Lainnya	9 689 913,00	18 096 987,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 279 708 279,53	1 275 131 350,81
PENDAPATAN ASLI DAERAH	65 808 842,72	72 158 809,48
Pajak Daerah	28 562 590,49	29 123 833,41
Retribusi Daerah	11 117 343,43	12 192 774,80
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	947 382,23	1 602 625,70
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25 181 526,57	29 239 575,56
DANA PERIMBANGAN	895 181 485,50	859 551 873,36
Bagi Hasil Pajak	9 143 665,61	12 610 672,90
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 242 713,47	7 835 231,98
Dana Alokasi Umum (DAU)	684 210 957,00	619 834 916,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	195 584 149,42	219 271 052,49
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	318 717 951,31	343 420 667,97
Pendapatan Hibah	65 197 634,55	57 858 526,47
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	83 709 946,76	69 617 577,50
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	169 810 370,00	215 944 564,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 206 214 223,95	1 185 639 934,08
PENDAPATAN ASLI DAERAH	86 313 480,52	97 122 937,15
Pajak Daerah	23 521 005,22	30 877 603,10
Retribusi Daerah	3 441 509,87	3 448 446,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 785 492,33	2 315 375,44
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57 565 473,10	60 481 512,41
DANA PERIMBANGAN	859 198 408,36	777 649 665,72
Bagi Hasil Pajak	7 218 112,24	12 379 206,40
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 734 632,01	7 658 296,13
Dana Alokasi Umum (DAU)	639 677 501,00	579 016 439,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	206 568 163,11	178 595 724,19
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	260 702 335,07	310 867 331,21
Pendapatan Hibah	46 865 952,57	48 560 776,09
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	84 268 963,50	71 430 610,32
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	129 567 419,00	190 875 944,80
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	858 292 112,73	817 634 010,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH	39 595 944,11	50 558 310,56
Pajak Daerah	11 579 264,20	20 226 693,81
Retribusi Daerah	7 648 911,47	2 365 687,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 606 943,09	1 736 531,58
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18 760 825,35	26 229 398,03
DANA PERIMBANGAN	632 875 492,47	558 907 762,31
Bagi Hasil Pajak	15 815 944,04	12 338 637,14
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 199 692,47	8 114 824,85
Dana Alokasi Umum (DAU)	455 225 458,00	407 710 506,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	155 634 397,96	130 743 794,32
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	185 820 676,15	208 167 937,75
Pendapatan Hibah	170 842,95	39 163 468,08
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	70 072 815,21	58 196 649,67
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13 809 071,00	8 120 650,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	101 767 947,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	102 687 170,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	946 904 183,52	865 445 745,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH	32 410 517,40	41 093 467,36
Pajak Daerah	14 996 362,60	18 903 586,92
Retribusi Daerah	3 228 954,10	4 760 043,40
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 358 292,77	2 499 398,81
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11 826 907,93	14 930 438,23
DANA PERIMBANGAN	661 079 127,84	631 141 021,98
Bagi Hasil Pajak	10 377 368,09	9 660 322,70
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 439 583,68	8 014 509,55
Dana Alokasi Umum (DAU)	488 530 984,00	441 732 032,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	156 731 192,07	164 079 498,74
Dana Insentif Daerah	0,00	7 654 659,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	253 414 538,27	193 211 256,10
Pendapatan Hibah	53 006 226,00	40 361 630,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	80 693 362,33	61 513 503,97
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	27 722 014,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	435 000,00	0,00
Dana Desa	89 161 665,00	90 895 123,00
Lainnya	2 396 270,94	440 999,13

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	831 574 978,36	806 559 354,26
PENDAPATAN ASLI DAERAH	29 323 369,73	27 813 379,28
Pajak Daerah	7 189 278,67	7 140 880,42
Retribusi Daerah	3 252 732,50	3 020 413,61
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	1 929 479,53
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	18 881 358,55	15 722 605,72
DANA PERIMBANGAN	587 653 782,03	578 256 314,98
Bagi Hasil Pajak	7 821 527,64	8 492 555,43
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 439 401,34	7 769 061,44
Dana Alokasi Umum (DAU)	435 029 435,00	404 769 066,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	139 363 418,05	142 779 101,11
Dana Insentif Daerah	0,00	14 446 531,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	214 597 826,60	200 489 660,00
Pendapatan Hibah	24 512 160,00	24 737 150,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	69 068 458,50	55 972 413,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	121 008 708,10	119 755 097,00
Lainnya	8 500,00	25 000,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2019 - 2020

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	2 294 656 383,15	2 145 801 470,57
PENDAPATAN ASLI DAERAH	627 296 544,83	537 542 438,10
Pajak Daerah	480 420 824,00	410 455 262,27
Retribusi Daerah	29 626 488,62	25 725 636,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17 468 775,20	21 276 185,22
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	99 780 457,01	80 085 354,31
DANA PERIMBANGAN	1 400 623 202,26	1 320 383 923,53
Bagi Hasil Pajak	38 435 501,58	52 953 586,19
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 537 771,14	7 722 390,01
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 110 510 308,00	1 019 027 785,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	246 139 621,54	240 680 162,32
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	266 736 636,07	287 875 108,94
Pendapatan Hibah	93 454 680,00	114 415 128,16
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	164 118 621,07	132 571 863,79
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9 163 335,00	40 888 117,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2019 - 2020

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	927 116 733,84	917 969 390,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH	176 199 324,17	221 649 607,05
Pajak Daerah	27 205 358,06	28 847 730,45
Retribusi Daerah	5 631 840,65	7 031 322,90
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 894 552,26	5 562 606,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138 467 573,20	180 207 947,58
DANA PERIMBANGAN	641 899 006,68	571 987 988,65
Bagi Hasil Pajak	10 198 622,88	12 948 597,40
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5 324 897,83	7 764 243,71
Dana Alokasi Umum (DAU)	476 738 335,00	435 052 452,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	149 637 150,96	116 222 695,55
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109 018 403,00	124 331 794,62
Pendapatan Hibah	15 908 400,00	16 350 760,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	71 063 330,41	56 362 479,44
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20 768 002,00	49 532 667,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Lainnya	1 278 670,58	2 085 888,18

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2019 – 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	22 542 810 802,07	20 960 763 048,17
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2 061 454 861,23	2 046 785 209,65
Pajak Daerah	971 504 417,08	931 542 703,32
Retribusi Daerah	97 686 179,78	106 200 529,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	72 862 680,80	82 400 517,67
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	919 401 583,58	926 641 459,37
DANA PERIMBANGAN	15 344 949 788,71	14 185 654 988,95
Bagi Hasil Pajak	249 020 128,80	272 616 370,53
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	128 147 785,67	142 728 526,83
Dana Alokasi Umum (DAU)	11 477 888 137,00	10 437 454 423,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	3 489 893 737,24	3 310 754 478,59
Dana Insentif Desa	0,00	22 101 190,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5 136 406 152,14	4 728 322 849,57
Pendapatan Hibah	1 073 976 696,52	1 065 585 026,98
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	1 465 984 813,31	1 157 639 246,20
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1 694 422 701,99	1 369 649 022,69
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 235 000,00	68 893 100,53
Dana Desa	570 229 557,08	916 862 132,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	328 557 383,25	457 861 877,22

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2019 - 2020

(000 Rp)

Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 126 018 591,76	984 638 003,14
Belanja Tidak Langsung	567 208 096,82	572 969 780,27
Belanja Pegawai	365 240 722,06	352 285 244,10
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	16 180 765,80	13 493 585,00
Belanja Bantuan Sosial	250 000,00	250 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 231 816,00	1 317 346,40
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	183 460 012,96	183 515 516,68
Belanja Tidak Terduga	844 780,00	22 108 088,09
Belanja Langsung	558 810 494,94	411 668 222,87
Belanja Pegawai	50 631 753,07	72 040 010,44
Belanja Barang dan Jasa	287 300 408,32	198 758 705,81
Belanja Modal	220 878 333,55	140 869 506,62

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 21. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 678 742 417,52	1 648 643 730,41
Belanja Tidak Langsung	1 029 913 807,91	1 038 820 486,52
Belanja Pegawai	595 604 313,78	571 727 253,09
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	46 013 658,60	49 698 135,20
Belanja Bantuan Sosial	957 863,72	958 833,09
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3 904 146,81	5 132 723,78
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	382 649 390,00	374 651 395,39
Belanja Tidak Terduga	784 435,00	36 652 145,96
Belanja Langsung	648 828 609,61	609 823 243,90
Belanja Pegawai	87 071 154,46	90 745 126,43
Belanja Barang dan Jasa	320 064 754,12	310 570 886,09
Belanja Modal	241 692 701,03	208 507 231,38

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	2 148 229 745,79	2 191 711 610,00
Belanja Tidak Langsung	1 227 378 291,91	1 371 507 393,00
Belanja Pegawai	801 611 283,63	868 865 309,00
Belanja Bunga	3 113 345,19	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	30 616 868,00	56 298 740,00
Belanja Bantuan Sosial	10 902 559,50	26 432 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10 478 351,90	16 502 975,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	370 643 883,70	401 407 869,00
Belanja Tidak Terduga	12 000,00	2 000 000,00
Belanja Langsung	920 851 453,88	820 204 217,00
Belanja Pegawai	123 416 772,99	104 337 282,00
Belanja Barang dan Jasa	422 584 788,18	473 708 586,00
Belanja Modal	374 849 892,71	242 158 349,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 23. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	2 086 664 487,60	2 091 137 257,70
Belanja Tidak Langsung	1 323 558 340,78	1 324 317 212,92
Belanja Pegawai	858 136 886,21	818 308 668,41
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	800 000,00	0,00
Belanja Hibah	49 179 698,77	91 771 824,00
Belanja Bantuan Sosial	1 597 000,00	1 642 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa	5 492 391,00	5 792 663,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	406 974 457,10	406 732 057,51
Belanja Tidak Terduga	1 377 907,70	70 000,00
Belanja Langsung	763 106 146,82	766 820 044,78
Belanja Pegawai	78 305 483,81	105 488 245,28
Belanja Barang dan Jasa	480 248 806,56	407 171 209,44
Belanja Modal	204 551 856,45	254 160 590,06

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	2 529 103 615,74	2 469 976 394,42
Belanja Tidak Langsung	1 582 067 174,34	1 663 675 863,51
Belanja Pegawai	1 068 166 509,98	1 032 858 727,13
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	48 882 336,27	127 832 872,39
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7 929 178,72	7 766 649,98
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	456 111 025,62	457 522 212,60
Belanja Tidak Terduga	978 123,75	37 695 401,41
Belanja Langsung	947 036 441,40	806 300 530,91
Belanja Pegawai	116 346 762,38	147 110 815,81
Belanja Barang dan Jasa	483 228 627,20	444 002 558,34
Belanja Modal	347 461 051,83	215 187 156,76

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 25. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2019 - 2020

(000 Rp)

Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 676 303 875,02	1 652 448 703,37
Belanja Tidak Langsung	1 148 512 721,65	1 144 316 801,61
Belanja Pegawai	756 849 383,06	717 082 798,05
Belanja Bunga	687 265,47	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	17 159 345,00	15 414 093,10
Belanja Bantuan Sosial	2 975 000,00	2 356 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	369 955 464,81	397 052 405,86
Belanja Tidak Terduga	886 263,31	12 411 504,60
Belanja Langsung	527 791 153,37	508 131 901,76
Belanja Pegawai	83 313 962,82	93 101 926,88
Belanja Barang dan Jasa	323 714 463,95	328 138 802,43
Belanja Modal	120 762 726,60	86 891 172,45

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 26. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 401 165 789,00	1 239 242 856,86
Belanja Tidak Langsung	762 483 261,00	824 158 259,64
Belanja Pegawai	479 525 538,00	481 600 727,46
Belanja Bunga	6 539 264,00	1 512 271,07
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	16 123 800,00	53 256 146,65
Belanja Bantuan Sosial	5 093 500,00	3 596 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	2 420 000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	254 820 816,00	257 863 508,80
Belanja Tidak Terduga	380 343,00	23 909 605,66
Belanja Langsung	638 682 528,00	415 084 597,22
Belanja Pegawai	14 184 768,00	28 095 642,30
Belanja Barang dan Jasa	326 531 195,00	255 548 670,73
Belanja Modal	297 966 565,00	131 440 284,19

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 27. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 190 187 623,00	1 157 855 922,94
Belanja Tidak Langsung	665 622 794,00	666 606 270,16
Belanja Pegawai	426 945 669,00	424 570 238,18
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	1 000 000,00	1 000 000,00
Belanja Hibah	22 836 300,00	22 499 836,99
Belanja Bantuan Sosial	4 879 600,00	5 264 700,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	209 696 190,00	202 276 373,64
Belanja Tidak Terduga	265 035,00	10 995 121,35
Belanja Langsung	524 564 829,00	491 249 652,79
Belanja Pegawai	66 323 292,00	71 870 718,99
Belanja Barang dan Jasa	320 661 929,00	302 787 178,28
Belanja Modal	137 579 608,00	116 591 755,51

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 28. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 270 047 767,99	1 275 887 434,82
Belanja Tidak Langsung	738 829 008,22	768 682 556,12
Belanja Pegawai	482 019 977,72	459 891 656,61
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	21 952 550,00	60 611 070,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3 029 914,70	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	230 905 740,20	224 155 363,10
Belanja Tidak Terduga	920 825,60	24 024 466,42
Belanja Langsung	531 218 759,77	507 204 878,70
Belanja Pegawai	72 328 214,10	84 296 651,00
Belanja Barang dan Jasa	262 211 408,02	248 793 434,31
Belanja Modal	196 679 137,65	174 114 793,39

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 29. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 193 779 078,99	1 168 097 521,62
Belanja Tidak Langsung	694 631 536,52	706 323 611,60
Belanja Pegawai	470 921 442,13	483 968 579,69
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	19 938 400,00	18 707 059,23
Belanja Bantuan Sosial	4 693 500,00	1 798 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2 596 852,93	2 246 015,61
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	196 481 341,47	188 591 915,90
Belanja Tidak Terduga	0,00	11 012 041,16
Belanja Langsung	499 147 542,47	461 773 910,03
Belanja Pegawai	57 833 260,39	86 321 999,48
Belanja Barang dan Jasa	252 334 849,86	227 307 219,97
Belanja Modal	188 979 432,22	148 144 690,57

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 30. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	889 548 919,21	822 017 898,51
Belanja Tidak Langsung	393 832 062,87	403 011 624,42
Belanja Pegawai	211 935 458,85	219 323 638,28
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	8 605 950,00	12 179 150,00
Belanja Bantuan Sosial	20 217 850,00	5 893 800,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	837 288,32	565 549,72
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	151 186 990,71	159 448 368,77
Belanja Tidak Terduga	1 048 525,00	5 601 117,65
Belanja Langsung	495 716 856,34	419 006 274,10
Belanja Pegawai	68 956 806,95	79 394 318,27
Belanja Barang dan Jasa	211 458 504,67	195 462 118,55
Belanja Modal	215 301 544,72	144 149 837,27

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 31. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	958 598 521,94	938 706 379,99
Belanja Tidak Langsung	429 081 910,76	457 689 273,07
Belanja Pegawai	298 266 977,14	284 137 930,89
Belanja Bunga	3 224 933,58	3 179 928,16
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	10 648 977,01	11 275 122,34
Belanja Bantuan Sosial	6 590 500,00	6 814 800,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 068 454,06	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	109 282 068,98	135 482 671,56
Belanja Tidak Terduga	0,00	16 798 820,12
Belanja Langsung	529 516 611,18	481 017 106,92
Belanja Pegawai	38 611 022,95	46 941 829,44
Belanja Barang dan Jasa	220 990 809,04	178 840 648,98
Belanja Modal	269 914 779,20	255 234 628,50

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	818 269 505,94	837 530 914,78
Belanja Tidak Langsung	400 271 319,72	425 855 469,55
Belanja Pegawai	209 123 552,81	213 485 448,26
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	15 407 253,42	40 831 248,16
Belanja Bantuan Sosial	7 352 036,05	2 343 601,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	748 183,20	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	166 415 294,24	164 807 343,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	333 637,13
Belanja Tidak Terduga	1 225 000,00	4 054 192,00
Belanja Langsung	417 998 186,22	411 675 445,23
Belanja Pegawai	63 465 961,17	61 847 639,11
Belanja Barang dan Jasa	177 481 191,11	164 792 991,73
Belanja Modal	177 051 033,94	185 034 814,40

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 33. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	2 190 661 163,23	2 127 497 164,30
Belanja Tidak Langsung	965 431 296,43	999 053 027,31
Belanja Pegawai	878 091 123,31	858 447 741,23
Belanja Bunga	15 223 964,42	3 391 039,10
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	58 115 459,42	103 783 336,98
Belanja Bantuan Sosial	9 841 250,00	6 992 750,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 174 259,78	0,00
Belanja Tidak Terduga	2 985 239,50	26 438 160,00
Belanja Langsung	1 225 229 866,81	1 128 444 136,99
Belanja Pegawai	245 927 369,16	312 251 919,81
Belanja Barang dan Jasa	668 577 338,93	552 469 715,51
Belanja Modal	310 725 158,72	263 722 501,67

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 34. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2019 – 2020

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	904 564 346,21	946 931 500,66
Belanja Tidak Langsung	335 964 930,54	388 912 951,00
Belanja Pegawai	322 844 097,05	330 463 178,10
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	9 277 604,10	31 955 773,65
Belanja Bantuan Sosial	1 745 000,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	765 930,23
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2 055 734,39	0,00
Belanja Tidak Terduga	42 495,00	25 728 069,02
Belanja Langsung	568 599 415,68	558 018 549,66
Belanja Pegawai	41 387 148,05	100 401 573,72
Belanja Barang dan Jasa	317 687 319,43	290 726 119,60
Belanja Modal	209 524 948,20	166 890 856,33

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 35. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	22 061 885 449,02	21 551 989 656,40
Belanja Tidak Langsung	12 264 786 553,51	12 755 566 943,56
Belanja Pegawai	8 225 282 934,73	8 117 017 138,47
Belanja Bunga	28 788 772,66	8 083 238,34
Belanja Subsidi	1 800 000,00	1 000 000,00
Belanja Hibah	390 938 966,39	709 607 993,68
Belanja Bantuan Sosial	77 095 659,27	64 342 984,09
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	37 316 577,64	42 509 853,72
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3 491 812 669,96	3 553 507 001,81
Belanja Tidak Terduga	11 750 972,86	259 498 733,44
Belanja Langsung	9 797 098 895,51	8 796 422 712,84
Belanja Pegawai	1 208 103 732,30	1 484 245 698,97
Belanja Barang dan Jasa	5 075 076 393,39	4 579 078 845,77
Belanja Modal	3 513 918 769,82	2 733 098 168,09

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 36. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	38 962 956,48	31 251 996,91
Penerimaan Pembiayaan Daerah	40 512 956,48	35 251 996,91
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40 512 956,48	35 251 996,91
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1 550 000,00	4 000 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 550 000,00	4 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	35 251 996,91	57 625 748,53

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 37. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	22 446 885,90	52 872 361,32
Penerimaan Pembiayaan Daerah	25 146 885,90	55 672 361,32
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25 146 885,90	55 672 361,32
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2 700 000,00	2 800 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2 700 000,00	2 800 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeaan	55 668 991,00	38 491 113,21

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 38. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	165 493 725,62	87 925 643,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	189 654 848,02	87 925 643,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	189 640 858,02	87 923 283,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	13 990,00	2 360,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	24 161 122,40	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	24 161 122,40	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	296 856 316,68	0,00

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	149 844 298,31	195 868 789,35
Penerimaan Pembiayaan Daerah	149 844 298,31	195 868 789,35
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	149 844 298,31	195 868 789,35
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	195 868 789,85	115 811 799,64

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	140 264 890,28	187 192 905,61
Penerimaan Pembiayaan Daerah	141 264 890,28	200 088 642,98
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	139 955 278,08	200 010 842,98
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	1 309 612,20	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	77 800,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1 000 000,00	12 895 737,36
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	9 444 031,94
Pembayaran Pokok Utang	0,00	3 451 705,42
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	200 010 842,98	148 470 970,01

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	(34 990 084,44)	62 278 453,80
Penerimaan Pembiayaan Daerah	7 015 954,80	65 278 453,80
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7 015 954,80	64 437 837,32
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	840 616,48
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	42 006 039,24	3 000 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	3 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	42 006 039,24	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	64 437 837,32	72 085 974,71

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	(5 430 600,00)	(38 159 076,24)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	7 964 838,00	(7 568 198,74)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	7 964 838,00	(7 568 198,74)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	13 395 438,00	30 590 877,50
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	5 800 000,00
Pembayaran Pokok Utang	12 395 438,00	24 790 877,50
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(7 658 968,00)	12 058 628,90

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	80 052 252,00	77 136 279,66
Penerimaan Pembiayaan Daerah	81 552 252,00	78 136 279,66
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81 552 252,00	78 136 279,66
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1 500 000,00	1 000 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 500 000,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	78 136 279,00	67 548 812,88

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	3 526 824,10	10 705 003,71
Penerimaan Pembiayaan Daerah	3 526 824,10	13 307 629,41
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3 526 824,10	13 307 629,41
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	2 602 625,70
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	2 602 625,70
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	13 187 335,64	9 948 919,70

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	32 494 635,67	(6 988 550,00)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	33 994 635,67	6 267 863,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33 994 635,67	44 929 780,62
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	- 53 000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1 500 000,00	13 256 413,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 500 000,00	2 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	44 929 780,62	60 472 140,08

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	113 703 761,27	103 796 690,58
Penerimaan Pembiayaan Daerah	113 703 761,27	107 060 222,16
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	113 703 761,27	107 060 222,16
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	3 263 531,58
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	3 263 531,58
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	82 446 954,79	99 412 802,69

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	66 529 970,69	124 967 647,81
Penerimaan Pembiayaan Daerah	69 893 740,48	137 922 726,99
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	21 444 567,47	55 003 523,20
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	47 928 173,02	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	521 000,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	82 919 203,79
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3 363 769,79	12 955 079,17
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500 000,00	1 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	2 863 769,79	11 455 079,17
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	54 835 632,26	50 849 035,83

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	54 906 488,39	65 232 030,21
Penerimaan Pembiayaan Daerah	59 406 488,39	68 232 030,21
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59 406 488,39	68 232 030,21
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4 500 000,00	3 000 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4 500 000,00	3 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	68 211 960,82	34 260 469,69

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2019 - 2020

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	- 89 723 433,94	- 6 488 873,40
Penerimaan Pembiayaan Daerah	8 800 003,56	14 266 985,97
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	8 800 003,56	14 266 985,97
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	98 523 437,50	20 755 859,38
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	6 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	59 023 437,50	14 755 859,38
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	39 500 000,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	14 271 785,97	11 815 432,87

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2019 - 2020

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	83 632 524,28	36 104 037,45
Penerimaan Pembiayaan Daerah	85 632 524,28	39 197 414,36
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	85 589 435,53	106 184 911,90
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	105 020,31
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	43 088,75	7,35
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2 000 000,00	3 093 376,91
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2 000 000,00	5 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	106 184 911,90	72 327 829,22

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2019 - 2020**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	823 612 468,92	1 094 999 408,30
Penerimaan Pembiayaan Daerah	1 017 914 901,55	1 202 610 283,20
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	968 099 037,58	1 118 718 275,27
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	49 237 785,22	105 020,31
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	578 078,75	80 167,35
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	83 706 820,27
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	194 302 432,63	107 610 874,90
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16 250 000,00	49 410 189,22
Pembayaran Pokok Utang	140 449 806,93	54 453 521,47
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	39 500 000,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	400 737 897,15	820 157 624,21

Sumber : Survei Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota



LAMPIRAN GAMBAR

Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2020

Realisasi Penerimaan APBD 2020 Provinsi Lampung

NAIK



2,23%

Dari yang dianggarkan



Realisasi Pengeluaran APBD 2020 Provinsi Lampung

TURUN



38,07%

Dari yang dianggarkan



Belanja Langsung

NAIK



24,18%*

Belanja Tidak Langsung

TURUN



58,48%*

*Dari Anggaran 2020

SILPA Realisasi APBD 2019

SURPLUS

Rp 302 Juta

Realisasi PAD 2020

5,85%



TURUN

Dibanding
Tahun
2019

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung, 35215

Telp. (0721) 482909 Fax. (0721) 484329

Email: bps1800@bps.go.id, Website: <http://lampung.bps.go.id>

ISSN 2656-4521



9 772656 452007